



RENSTRA 2016 - 2021



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat-Nya sehingga Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Priode 2016 – 2021 dapat tersusun sesuai dengan waktunya.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, ujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menuju *Good Governance*, secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Pendoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021, Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016 -2021.

Renstra ini terdiri dari pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Putussibau, 08 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos.,M.Si.

Platubina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Kata Pengantar ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN..... 8

 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..... 8

 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13

 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22

BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 26

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26

 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 27

 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 28

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 30

 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 31

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN..... 33

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..... 33

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 35

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 37

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 67

BAB VIII: PENUTUP..... 69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi di segala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan di bidang management pemerintahan dan semua itu merupakan terobosan menciptakan tertib Administrasi Negara yang handal, efisien, efektif, profesional dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi RRPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Rencana Satrategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode lima tahun kedepan memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan progran dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016-2021, yang harus dilaksanakan secara terpadu sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2) Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menterjemahkan visi dan misi kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan berpedoman pada RPJM 2016-2021;
- b. Merumuskan Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016-2021;
- c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode Rensta yang lalu.

1.4 Sistimatika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Alur pikir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 disajikan dalam gambar berikut :

Gambar Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- RPJM Kabupaten Kapuas Hulu
- Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- Dokumen Perencanaan Lainnya
- Masukan-masukan *Stakeholder*
- Pengumpulan, Pengolahan Data dan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal.



Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;

- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB III PERMASALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayaann Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra;
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan.

b. Fungsi Kepala Dinas

1. Penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan instansi lainnya;
3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok Sekretaris:

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan

keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas.

b. Fungsi:

- ~ Penyusunan program kerja Sekretariat;
- ~ Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- ~ Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- ~ Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- ~ Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- ~ Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- ~ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat, dibantu oleh:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Aparatur.

3. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengelolaan pendidik dan tenaga Kependidikan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 2) Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- 5) Pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara periodik;
- 7) Pelaporan pengembangan pelaksanaan tugas Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara periodik; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dibantu oleh :

1. Seksi Pendidikan Dasar; dan
2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

3. Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Dasar;
- 2) Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pembinaan pengelolaan pendidikan dasar;
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- 4) Pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran;
- 5) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendidikan dasar;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Dasar;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pendidikan Dasar secara periodik;
- 8) Pelaporan pengembangan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Dasar secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Dasar dibantu oleh :

1. Seksi Pengembangan Kurikulum
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 3. Seksi Tata Kelola Pendidikan.
4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 2) Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan pengembangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 3) Pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini;
- 4) Pembinaan dan pengembangan pendidikan kemasyarakatan;
- 5) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakatdibantu oleh :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
2. Seksi Pendidikan Masyarakat.

5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Kebudayaan;
- 2) Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan Kebudayaan;
- 3) Pelestarian cagar budaya dan nilai sejarah lokal;
- 4) Pelestarian kesenian daerah dan tradisi yang berlaku di masyarakat;
- 5) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kebudayaan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Kebudayaan dibantu oleh :

- Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Nilai Sejarah; dan
- Seksi Pelestarian Kesenian dan Tradisi.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya, berikut ini ditampilkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Kondisi umum Pegawai

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

TABEL 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	60	63,16
2	Fungsional	35	36,84
JUMLAH		95	100,00

TABEL 2.2
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

No.	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	1,67
2	Eselon III	5	8,33
3	Eselon IV	12	20,00
4	Staf	42	70,00
JUMLAH		60	100,00

TABEL 2.3
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/Fungsi

No.	ESELON	JUMLAH	%
1	Guru / Kepala Sekolah	2.545	98,64
2	Pengawas / Penilik	35	1,36
JUMLAH		2.580	100,00

TABEL 2.4
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 3	-	0,00
2	Strata 2	4	6,67
3	Strata 1 / Diploma IV	24	40,00
4	Diploma 3	9	15,00
5	Diploma 2	-	0,00
6	Diploma 1	-	0,00
7	SLTA	23	36,08
JUMLAH		60	100,00

TABEL 2.5
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	GURU/KEPA- LASEKOLAH	PENGAWAS/ PENILIK	JUMLAH	%
1	Strata 3	-	-	-	0,00
2	Strata 2	-	-	-	0,00
3	Strata 1 / Diploma IV	1.088	28	1.116	43,26
4	Diploma 3	20	-	20	0,78
5	Diploma 2	1.044	7	1.051	40,73
6	Diploma 1	5	-	5	0,19
7	SMA/SPG	387	-	387	15
8	SMP	1	-	1	0,04
JUMLAH		2.577	35	2.580	100,00

TABEL 2.6
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	1.259	48,80
2	Golongan III	1.118	43,33
3	Golongan II	202	7,83
4	Golongan I	1	0,04
JUMLAH		2.580	100,00

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 2.640 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 60 orang dan pegawai fungsional sebanyak 2.580 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 60 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 5 orang, pejabat eselon IV ditingkat kabupaten sebanyak 12 orang, dan staf sebanyak 42 orang. Untuk jumlah pegawai fungsional yang terdiri dari guru dan kepala sekolah sebanyak 2.545 orang yang tersebar ditingkat satuan pendidikan yaitu ditingkat Tk.N, SDN, SMPN dan pengawas/penilik berjumlah 35 orang, terdiri dari pengawas TK/SD dan pengawas SMP.

Data pegawai struktural berdasarkan kualifikasi Pendidikan Strata 2 sebanyak 4 orang, Strata 1 / Diploma IV terdiri dari 24 orang, Diploma 3 terdiri dari 9 orang, dan SLTA terdiri dari 23 orang. Sedangkan data fungsional berdasarkan kualifikasi pendidikan terdiri dari Strata 1 /Diploma IV terdiri dari 1.116 orang, Diploma 3 terdiri dari 20 orang, Diploma 2 terdiri dari 1.051 orang, Diploma 1 terdiri dari 5 orang, SMA/SPG terdiri dari 387 orang, SMP terdiri dari 1 orang. Data pegawai fungsional berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 1.259 orang, golongan III sebanyak 1.118 orang, golongan II sebanyak 202 orang dan golongan I sebanyak 1 orang.

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Kondisi Umum Sarana Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tergambar pada tabel berikut :

TABEL 2.7
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
A.	SARANA GEDUNG		
1	Tanah	2.998.036,73	M2
2	Gedung Kantor Disdikpor	1	Unit
3	Gedung UPT Disdikpor	22	Unit
4	Gedung TK Negeri	22	Unit
5	Gedung SDN	395	Unit
6	Gedung SMPN	90	Unit
B.	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	2	Unit
2	Kendaraan roda dua	77	Unit
C.	SARANA PERKANTORAN		
1	Printer	103	Unit
2	Komputer/PC	34	Unit
3	Laptop	183	Unit
4	Stabilizer	108	Unit
5	Lemari Arsip	76	Unit
6	Filling Kabinet	72	Unit
7	Mesin Genset	4	Unit
8	Proyektor	54	Unit
9	Note book	57	Unit

10	Camera	9	Unit
11	Handycam	3	Unit
12	Printer Laset Jet	14	Unit
13	Printer Double Folio	10	Unit
14	Rak Besi	6	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	APK 'Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16,75	35,56	24,65	48,18	58,00	17,50	35,56	24,65	48,18	55,17	104,5	100	100	100	95,12
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)				76,26	95,53	95,78	95,82	89,00	76,26	95,53	95,78	95,82	95,58	100	100	100	100	107,39
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A				97,5	100	100	90,75	96,10	111,58	85,69	85,69	91,14	94,20	114,4	85,69	85,69	100,43	98,02
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B				67,5	50	65,75	63,16	58,15	73,15	50,92	63,15	56,40	59,77	108,4	101,8	96,05	89,30	102,79
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				40	45,75	52,15	48,24	42,90	40,75	34,81	48,24	42,89	42,90	101,9	76,09	92,50	88,91	100
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI				0,7	0,30	0,30	0,41	2,5	0,24	0,30	0,30	0,39	0,21	34,29	100	100	95,12	8,40
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs				1	0,04	0,10	0,22	0,47	0,77	0,04	0,20	0,22	0,22	77	100	200	100	46,81
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA				0,9	0,09	0,25	0,10	0,26	0,85	0,09	0,38	0,10	0,26	94,44	100	152	100	100

9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI				99,83	99,85	100	97,14	100	99,93	99,85	100	97,14	98,75	100,1	100	100	100	98,75
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs				99,25	97	99,97	95,38	99,85	99,79	97	99,97	95,38	99,85	100,5	100	100	100	100
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA				99,50	93,24	98,81	96,28	90,48	99,77	93,24	98,81	96,28	90,48	100,3	100	100	100	100
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				96,09	97,77	99,47	99,47	84,75	91,71	96,09	97,77	99,47	84,75	95,44	98,28	98,29	100	100
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA				85,93	94,98	83,14	83,14	84,75	85,98	85,93	94,98	83,14	84,75	100,1	90,47	114,24	100	100
14	Rata-Rata Nilai UN dan UASB	SD			6	6,5	6,5	6,50	61,75	6,18	6,5	6,5	6,15	61,90	103	100	100	94,62	100,24
		SMP			6	6,83	7,25	7,50	48,88	6,24	6,83	7,17	7,35	48,88	104	100	98,90	98	100
		SMA			7	6,81	7,15	6,75	45,92	7	6,81	6,69	5,00	87,9	100	100	93,57	74,07	191,42
		SMK				6,25	6,5	6,50	53,26		6,25	6,31	56,68	5,07		100	97,08	872	9,52
15	Persentase Guru Sesuai Kualifikasi	SD			5,28	57,65	79,35	62,70	32,02	5,28	57,65	79,35	62,70	32,03	100	100	100	100	100,03
		SMP			71,83	83,95	84,79	88,64	90,13	71,83	83,95	84,79	88,64	90,13	100	100	100	100	100
		SMA			80	95,02	99,53	98,62	97,81	80	95,02	99,53	98,62	97,81	100	100	100	100	100
		SMK				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
17	Rasio Guru/Murid	SD			13,92	70	75	60	56	13,98	70	75	60	56	100,4	100	100	100	100

		SMP				22,37	83	83	77	50	22,44	83	83	77	50	100,3	100	100	100	100
		SMA				12,00	87	97	97	123	12,42	87	97	97	123	103,5	100	100	100	100
		SMK					57	67	63	90		57	67	63	90		100	100	100	100
16	Rasio Ruang Kelas dibandingkan dengan jumlah siswa	SD				14,99	95	67	90	70	15,05	95	67	90	70	100,4	100	100	100	100
		SMP				25	77	90	80	83	25,09	77	90	80	83	100,4	100	100	100	100
		SMA				34,88	97	80	93	93	34,80	97	80	93	93	99,77	100	100	100	100
		SMK					97	93	93	93		97	93	93	93		100	100	100	100
17	Rasio Guru/setiap Sekolah	SD				0,17	67	56	56	56	0,17	67	56	56	56	100	100	100	100	100
		SMP				0,24	40	40	40	50	0,24	40	40	40	50	100	100	100	100	100
		SMA				17,86	47	40	60	70	17,69	47	40	60	70	99,06	100	100	100	100
18	Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)					0,31	0,30	0,30	0,85	0,13	0,31	0,30	0,30	0,85	0,10	100	100	100	100	76,92
19	Jumlah Lapangan Olahraga per 1.000 Penduduk					0,28	0,23	0,23	0,85	1,06	0,28	0,23	0,23	0,85	1,06	100	100	100	100	100
20	Jumlah Kegiatan pembinaan pemuda						3	3	2	2		3	3	2	2		100	100	100	100

21	Jumlah event olah raga Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan					6	8	9	15		6	8	9	15		100	100	100	100
22	Jumlah event olah raga Tingkat Regional yang diikuti					3	5	9	8		3	5	9	6		100	100	100	75,00
23	Jumlah event Olah Raga Tingkat Nasional yang diikuti					2	3	4	2		2	3	4	2		100	100	100	100
24	Pembinaan Olah Raga kepada Pengda Keolahragaan di Kabupaten							23	23				23	23				100	100

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisai anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.014.453.400,00	3.198.871.500,00	3.671.699.500,00	4.175.664.500,00	4.260.406.500,00	3.686.109.080,00	2.968.699.980,00	2.962.816.390,00	3.870.060.729,00	3.986.472.547,00	91,82	92,80	80,69	80,69	93,57	386.421.908.000,00	349.483.174.520
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.127.397.000,00	596.661.920,00	2.596.487.000,00	1.353.659.000,00	2.509.989.000,00	1.109.876.000,00	472.018.000,00	2.273.582.000,00	1.223.488.000,00	2.411.401.859,00	98,45	79,11	87,56	87,56	96,07	163.683.878.400,00	149.807.317.180
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	88.370.000,00			154.400.000,00	154.450.000,00	87.670.000,00			154.400.000,00	154.400.000,00	99,21			100,00	99,97	7.944.400.000,00	7.929.400.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.000.000,00	550.835.000,00	550.835.000,00	915.307.000,00	661.531.000,00	67.045.300,00	400.723.100,00	263.956.300,00	626.494.700,00	590.471.139,00	13,41	72,75	47,92	47,92	89,26	63.570.160.000,00	38.973.810.780
5	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	400.677.250,00	470.008.000,00	645.957.000,00	519.708.000,00	998.221.750,00	364.495.650,00	343.949.000,00	412.176.200,00	443.555.200,00	671.254.960,00	90,97	73,18	63,81	63,81	67,25	60.691.440.000,00	44.708.620.200
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	547.264.500,00	463.045.000,00	805.365.000,00	2.331.456.500,00	1.525.811.500,00	436.624.500,00	429.582.000,00	793.944.000,00	2.226.162.860,00	1.498.907.100,00	79,78	92,77	98,58	98,58	98,24	113.458.850.000,00	107.704.409.200
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	74.261.841.400,00	38.969.769.900,00	49.936.194.980,00	18.815.773.000,00	27.258.069.100,00	72.603.581.867,00	26.499.138.540,00	46.537.424.975,00	17.962.817.550,00	26.604.056.009,00	97,77	68,00	93,19	93,19	97,60	4.184.832.967.600,00	3.804.140.378.820
8	Program Pendidikan Menengah	4.637.820.000,00	11.478.241.100,00	11.457.564.350,00	9.320.560.000,00	3.189.043.000,00	3.769.716.425,00	11.256.728.368,00	10.439.611.550,00	9.237.039.824,00	3.056.519.900,00	81,28	98,07	91,12	91,12	95,84	801.664.569.000,00	755.192.321.340
9	Program Pendidikan Non Formal	489.605.500,00	536.567.000,00	834.029.000,00	967.385.000,00	1.437.932.500,00	475.395.500,00	515.258.200,00	771.076.700,00	896.454.601,00	1.363.340.200,00	97,10	96,03	92,45	92,45	94,81	85.310.380.000,00	80.430.504.020
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.275.835.180,00	3.214.173.500,00	3.371.377.500,00	4.044.882.500,00	4.586.242.000,00	2.674.887.400,00	2.593.995.700,00	2.848.032.240,00	3.741.867.948,00	4.494.841.670,00	81,66	80,70	84,48	84,48	98,01	369.850.213.600,00	327.072.499.160
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	456.161.970,00	397.329.000,00	505.570.000,00	305.613.000,00	501.284.650,00	379.741.970,00	340.789.000,00	269.861.400,00	242.337.700,00	428.929.040,00	83,25	85,77	53,38	53,38	85,57	43.319.172.400,00	33.233.182.200
12	Program Pendidikan Luar Sekolah Pemuda & Olahraga	1.605.867.300,00	1.365.879.000,00	1.592.717.000,00	1.743.458.000,00	1.553.474.000,00	1.603.894.500,00	1.365.286.900,00	1.571.872.900,00	1.578.324.400,00	1.542.104.900,00	99,88	99,96	98,69	98,69	99,27	157.227.906.000,00	153.229.672.000
		91.405.293.500,00	61.241.380.920,00	75.967.796.330,00	44.647.866.500,00	48.636.455.000,00	87.259.038.192,00	47.186.168.788,00	69.144.354.655,00	42.203.003.512,00	46.802.699.324,00	95,46	77,05	91,02	91,02	96,23	6.437.975.845.000,00	5.851.905.289.420

Jika kita perhatikan tabel diatas, target indikator dapat digambarkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 (lima) tahun kedepan pencapaian kinerja apabila didukung dengan dana yang memadai dan sesuai rencana maka indikator kinerja akan tercapai sesuai rencana.

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan dan Bidang Kebudayaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan / *Strengths* (S)

- a. Animom masyarkat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannyalembaga-lembaga PAUD yang didirikan masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat sudah mencapai rata-rata nasional dan provinsi, sedangkan SMP/ sederajat masih dibawah rata-rata nasional dan provinsi berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan pemuda dan olahraga;
- d. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat lulus 100;
- e. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 89,1 %;

b. Kelemahan/ *Weaknesess* (W)

- a. Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah rata-rata nasional dan provinsi;
- b. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujutkan sepenuhnya;
- c. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan menengah masih belum memadai;
- d. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- e. Peningkatan akdemik perguruan tinggi terus ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang / Opportunities (O)

- 1) Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan menengah);
- 2) Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- 3) Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- 4) Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam peningkatan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- 5) Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sektor pendidikan sangat diharapkan;
- 6) Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan oprasional sekolah (BOS), biak untuk pendidikan dasar maupun menengah;
- 7) Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Ancaman / Threats(T)

- 1) Pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun semakin meningkat;
- 2) Terdapat kekurangan tenaga pendidikan dikarenakan masa purna bahkti (pensiun) sehingga berpengaruh pada proses belajar mengajar disatun pendidikan yang ada;
- 3) Kurang memadainya sarana pendukung yang sesuai standar pembelajaran disemua jenjang.

Dengan berpijak pada analisa lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar diatas, maka strategi yang diperlukan yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- a. Meningkatkan sarana penunjang pendidikan yang memadai sesuai standar pada semua jenjang satuan pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan prasarana ruang kelas baru bagi satuan pendidikan yang kurang untuk memenuhi daya tampung pada semua jenjang satuan pendidikan;
- c. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang satuan pendidikan;
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar fungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- e. Meningkatkan kerja sama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada disekitar perbatasan.

2. Strategi W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang satuan pendidikan;
- b. Meningkatkan sarana prasaranna pendidikan yang memadai sesuai standar pada semua jenjang satuan pendidikan;
- c. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- d. Meningkatkan pengemangan program keahlian pada satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan tuntutan dunia usaha biak secara kualitas maupun kuantitas.

- e. Meningkatkan program sekolah berasrama mengingat akses dari sekolah ke pemukiman penduduk sangat jauh.

3. Strategi S-T

- a. Meningkatnya daya tampung dengan cara membangun ruang kelas baru;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- c. Menjalin berbagai kejasama dengan stakeholder pendidikan;
- d. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- e. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. Strategi W-T

- a. Meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sert kompetensi penilik PNF dan tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan program sekolah berasrama mengingat pemukiman penduduk berpencar;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran masyarakat, pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB II), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah :

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) sesuai dengan program pemerintah satu desa satu PAUD berjumlah 199 lembaga PAUD yang ada sedangkan jumlah 282 desa PAUD yang ada baru mencapai 70,57 % dari 100% masih 83 desa yang belum memiliki PAUD atau 29,43%, serta peningkatan kualitas mutu pengelolaan/guru maupun pasilitas sarana bermain;
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain adalah APM SD/ sederajat, capaian rata-rata kabupaten pada tahun 2016 sebesar 96,10%. Sedangkan APM SMP/ sederajat, capaian rata-rata kabupaten pada tahun 2016 sebesar 59,77%.
- c. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah.
- d. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2016, guru SD adalah 32,02%, SMP 90,13%, khusus untuk sekolah dasar (SD) perlu peningkatan kualifikasi akademik PTK yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah dari PTK yang sudah S1/D4, masih

terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) adalah “ **MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS** “adapun misinya adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari tiga misi tersebut diatas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi ke dua. Dari misi tersebut tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ingin dicapai antara lain adalah :

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- b) Indeks Gini
- c) Angka Harapan Hidup (AHH)
- d) Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
- e) Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
- f) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- g) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tiga dari tujuh tujuan diatas, adalah mengerucut pada tujuan pembangunan sektor pendidikan, yaitu terdapat pada point (a), point (d) dan point (e) dengan sasaran masing-masing adalah :

1. Sasaran yang akan dicapai pada urusan Pendidikan adalah Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih menekankan kepada kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan diarahkan kepada kualitas hasil anak didik.

2. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktik, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
 - a) Rata-rata Angka Melek Huruf
 - b) Angka Partisipasi Murni
 - c) Angka Partisipasi Kasar
 - d) Angka Putus Sekolah
 - e) Rata - Rata Nilai UN dan UAS
 - f) Persentase guru sesuai kualifikasi
 - g) Angka rata-rata lama sekolah
 - h) Rasio ruang kelas dibandingkan jumlah siswa
 - i) Rasio guru / murid
 - j) Angka kelulusan
 - k) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Sasaran yang akan dicapai pada urusan Kebudayaan adalah terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
 - a) Penyelenggaraan even seni dan budaya daerah
 - b) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tahun 2015-2019 periode renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan pada sektor pendidikan yang dapat diselaraskan antara program nasional dan kabupaten dalam 5 (lima) tahun kedepan namun demikian, sebagai langkah awal telaahan dapat dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada peraturan menteri perencanaan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Dalam sosialisasirancangan tersebut, secara umum sasaran RPJMN 2015-

2019 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Pendapatan perkapita;
3. Pemerataan pembangunan;
4. Pengentasan kemiskinan;
5. Keberlanjutan pembangunan;
6. Peningkatan daya saing;
7. Inovasi teknologi;
8. SDM berkualitas;
9. Resiliensi berbasis swakarsa.

Dari sembilan point sasaran di atas, hanya satu yang relevan dengan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu **SDM berkualitas**, yang kemungkinan sasaran tersebut akan dijabarkan secara detil dalam renstra kemendikbud periode yang akan datang. Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah:

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
4. **Sinergi SDM, IPTEK dengan industri**;
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2014-2018, dari 7(tujuh) point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu Peningkatan kuantitas, kualitas, pemerataan dan pemberian kesempatan kepada anak usia sekolah maupun masyarakat lainnya untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas termasuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun yang bermutu untuk mendorong peningkatan IPM Kalbar.

Kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dirumuskan dalam isu-isu strategis tahun 2013-

2018, yang dijabarkan dalam setiap misi RPJMD periode 2013-2018, antara lain adalah:

1. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan (khususnya pendidikan menengah);
2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) dan menurunkan angka mengulang kelas;
3. Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan menurunkan angka buta aksara;
4. Meningkatkan kualitas output pendidikan;
5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Sementara kebijakan umum anggaran Propinsi Kalimantan Barat Pada 5 (lima) tahun mendatang terkait pembangunan pendidikan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, antara lain adalah:

- (1) Kalimantan Barat bebas putus sekolah semua jenjang sekolah;
- (2) Pendidikan nonformal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas;
- (3) Pendidikan berkebutuhan khusus;
- (4) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014-2034 adalah "Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuntaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi".

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Kapuas Hulu meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana sistem perkotaan; (b) rencana sistem perdesaan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana jaringan energi; (e) rencana jaringan telekomunikasi; dan (f) rencana jaringan sumber daya air.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan jumlah penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang memungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah perdesaan harus mendapatkan perhatian serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing .

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut diatas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan Nasional periode tahun 2015-2019; (3) imflikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten Kapuas Hulu terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
2. Penyebaran sasaran Pendidikan yang belum merata;
3. Masih banyaknya ruang kelas dalam kondisi rusak;
4. Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan;
5. Masih rendahnya tenaga pendidik yang berkualitas (memiliki kompetensi), dan msih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4;

6. Belum meratanya penyebaran guru kedaerah pedalaman;
7. Implementasi kurikulum 2013;
8. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai sesuai standar.

Setelah melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan diatas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain :

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS);
2. Peningkatan akses peningkatan (sarana dan prasarana);
3. Peningkatan Angka Melek Huruf;
4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
5. Peningkatan Jumlah Sekolah Unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
7. Peningkatan penyelenggaraan even seni dan budaya daerah;
8. Terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan terdapat pada tabel berikut ini :

TABEL. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkannya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	CC	CC	CC	B	BB
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah	7,05	7,10	7,15	7,20	7,25
			Harapan Lama Sekolah	11,89	11,94	11,99	12,04	12,04
			Nilai Rata-rata Ujian Sekolah Siswa SD	62,50	64,00	65,00	67,50	68,00
			Nilai Rata-rata Ujian Nasional Siswa SMP	50,55	50,95	60,00	65,00	66,00
		Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,05	7,10	7,15	7,20	7,25
			Harapan Lama Sekolah	11,89	11,94	11,99	12,04	12,04
			Angka Partisipasi Kasar (APK)-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	91,25	91,50	91,75	92,00	92,15
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	60,15	63,45	67,80	70,13	70,15
			Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16

			Angka Kelulusan (AL) SD	100	100	100	100	100
			Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	100	100	100
			Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	93,40	93,50	93,60	93,70	93,80
			Nilai Rata-rata Ujian Sekolah Siswa SD	62,50	64,00	65,00	67,50	68,00
			Nilai Rata-rata Ujian Nasional Siswa SMP	50,55	50,95	60,00	65,00	66,00
			Persentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	95,80	95,84	95,88	95,92	95,96
			Persentase guru sesuai kualifikasi SD/MI	66,26	67,26	69,26	70,00	71,00
			Persentase guru sesuai kualifikasi SMP/MTs	89,50	90,00	95,00	96,00	97,00
3	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Seni Daerah	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2
			Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	14	14	14	14	14

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2016- 2021 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, serta mengacu pada renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021, evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2016. Kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan ini, juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019. Adapun Srtategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu terdapat pada tabel berikut ini :

TABEL. 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

VISI	:	MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS			
MISI I	:	MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH			
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah kebijakan
Tujuan 1. Meningkatkanya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	1.	Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	1.	Strategi 1.1. predikat sapik	1. Arah kebijakan 1.1. Meningkatkan Laporan kinerja yang diselesaikan
MISI II	:	MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN			
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan	1.	Sasaran 1.1. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1.	Strategi 1.1. Penyediaan dana pendidikan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin atau yang berkekurangan serta peningkatan mutu melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah	1. Arah kebijakan 1.1. Meningkatkan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, mewujudkan pendidikan bermutu, relevan, berkarakter dan berbudaya saing, dan menuju wajib belajar 9 tahun.
			2.	Strategi 1.2. Memastikan ketersediaan rasio guru dengan siswa maksimal yang disyaratkan oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP)	
			3.	Strategi 1.3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru	

			4. Strategi 1.4. Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan kepada pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas mengajar secara berkesinambungan	
			5. Strategi 1.5. Penyebarluasan TIK untuk e-pembelajaran dan e-administrasi.	
			6. Strategi 1.6. Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	
			7. Strategi 1.7. Penyediaan sarana pendidikan	
			8. Strategi 1.8. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	
			9. Strategi 1.9. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Non formal dan Informal untuk Menggapai Layanan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal (Reaching The Unreached)	
			10. Strategi 1.10. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	
			11. Strategi 1.11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal yang terpadu untuk memberikan kesempatan berpartisipasi yang luas kepada masyarakat	
Tujuan 2. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Seni Daerah	1.	Sasaran 2.1. Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	1. Strategi 2.1. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pembinaan organisasi Seni dan Budaya untuk mencapai prestasi secara maksimal.	1. Arah kebijakan 2.1. Meningkatkan even seni dan budaya daerah yang mampu bersaing ditingkat provinsi maupun nasional serta melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
2. Terjadi dalam waktu yang relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan;
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga/masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Restra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017-2021.

TABEL.6.1
RENCANA PROGAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			67.587.857.765		84.430.397.400		134.327.585.320		83.965.043.736		84.271.375.073	DIKBUD		
Tujuan 1. Meningkatkan a akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Sasaran 1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas			Nilai Lakip Perangkat Daerah	C	CC		CC		CC		B		BB		DIKBUD	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.438.270.500		4.195.423.500		4.152.955.500		4.152.955.500		4.152.955.500	DIKBUD		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Surat yang terkirim ketempat tujuan	100%	100%	27.850.000	100%	27.850.000	100%	27.850.000	100%	27.850.000	100%	27.850.000	DIKBUD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pegawai	100%	100%	62.400.000	100%	67.320.000	100%	67.320.000	100%	67.320.000	100%	67.320.000	DIKBUD	
				Jumlah tagihan telepon	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	DIKBUD		
				Jumlah Tagihan air	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	DIKBUD		
				Jumlah Tagihan listrik	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	DIKBUD		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/ Operasional	2 Mobil	2 Mobil	4.000.000	2 Mobil	4.000.000	3 Mobil	6.000.000	3 Mobil	6.000.000	3 Mobil	6.000.000	DIKBUD	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	28 orang	28 orang	96.840.000	27 orang	157.800.000	27 orang	157.800.000	27 orang	157.800.000	27 orang	157.800.000	DIKBUD	
			Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	4 orng	4 orng	77.281.500	3 orng	77.281.500	3 orng	77.281.500	3 orng	77.281.500	3 orng	77.281.500	DIKBUD	

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bidang	5 Bidang	5 Bidang	189.822.000	5 Bidang	188.082.000	5 Bidang	188.082.000	5 Bidang	188.082.000	5 Bidang	188.082.000	DIKBUD	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penggandaan/Fotocopy, untuk keperluan Dinas Pendidikan Pemuda	15000 Lembar	15000 Lembar	102.541.000	15000 Lembar	102.541.000	15000 Lembar	102.541.000	15000 Lembar	102.541.000	15000 Lembar	102.541.000	DIKBUD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 UPT	24.180.000	2 UPT	54.468.000							DIKBUD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				241.550.000		83.050.000		83.050.000		83.050.000		83.050.000	DIKBUD	
		jumlah Laptop	6 unit	1 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		DIKBUD	
		jumlah printer	10 unit	12 Unit										DIKBUD	
		jumlah handycam	2 unit											DIKBUD	
		jumlah sound system	1 set											DIKBUD	
		Jumlah Mesin Fotocopy		1 Unit										DIKBUD	
		Jumlah AC		3 Unit										DIKBUD	
		Komputer PC		10 Unit										DIKBUD	
		USB DMR Exclusive		1 Unit										DIKBUD	
		Proyekor		1 Unit										DIKBUD	
		Screen Gatung		1 Unit										DIKBUD	
		sound sytem		1 Set										DIKBUD	
		Mesin Potong Rumput				1 Unit								DIKBUD	
														DIKBUD	
														DIKBUD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah surat kabar	3 surat kabar	5 surat kabar	25.000.000	5 surat kabar	25.000.000	5 surat kabar	25.000.000	5 surat kabar	25.000.000	5 surat kabar	25.000.000	DIKBUD	
	Penyediaan Makanan dan Minuman				678.000.000		365.340.000		365.340.000		365.340.000		365.340.000	DIKBUD	

		Jumlah Pegawai Yang menerima Makanan dan Minuman	75 orang	80 orang		81 Orang		81 Orang		81 Orang		81 Orang		DIKBUD	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				776.000.000		796.000.000		796.000.000		796.000.000		796.000.000	DIKBUD	
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke Ibukota Propinsi / Kab. / Kota Lainnya di Kalimantan Barat	100 Kali	100 Kali		100 Kali		100 Kali		100 Kali		100 Kali		DIKBUD	
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke Ibukota Propinsi / Kab. / Kota Lainnya di Kalimantan Barat	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		DIKBUD	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Kunjungan Kerja dalam daerah	jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Rapat Tennis dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	101 Kali	101 Kali	300.000.000	101 Kali	300.000.000	101 Kali	300.000.000	101 Kali	300.000.000	101 Kali	300.000.000	DIKBUD	
														DIKBUD	
	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Terdatanya Guru yang menerima Tunjangan				2151 Orang	42.360.000	2151 Orang	42.360.000	2151 Orang	42.360.000	2151 Orang	42.360.000	DIKBUD	
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPA Perubahan dan DPPA Penyempurnaan	4 Dokumen	4 Dokumen	41.327.000	4 Dokumen	40.252.000	4 Dokumen	40.252.000	4 Dokumen	40.252.000	4 Dokumen	40.252.000	DIKBUD	
	Penyusunan LPPD	Jumlah Dokumen						1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	DIKBUD	

	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah Dokumen						1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	DIKBUD	
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pegawai Honorer	8 orang	9 orang	183.600.000	12 orang	258.600.000	12 orang	258.600.000	12 orang	258.600.000	12 orang	258.600.000	DIKBUD	
	Penyediaan Dana Operasional Pendidikan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan-kecamatan	Tersedianya dana operasional Unit Pelaksanaan Teknis Pendidikan di kecamatan-kecamatan	23 Kecamatan	23 Kecamatan	1.579.879.000	23 Kecamatan	1.577.479.000	23 Kecamatan	1.577.479.000	23 Kecamatan	1.577.479.000	23 Kecamatan	1.577.479.000	DIKBUD	
	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Pemasangan Iklan	12 Kali	12 Kali	28.000.000	12 Kali	28.000.000	12 Kali	28.000.000	12 Kali	28.000.000	12 Kali	28.000.000	DIKBUD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				894.103.000		1.066.824.900		51.316.824.900		1.066.824.900		1.066.824.900	DIKBUD	
	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor				499.776.000									DIKBUD	
		Jumlah gedung kantor UPT yang akan dibangun	2 Unit											DIKBUD	
		Jumlah Aula Kantor UPT yang akan dibangun	2 Unit											DIKBUD	
		jumlah Perlengkapan alat PDAM Mess Guru		1 Set										DIKBUD	
		Pengecoran Jalan Kantor yang dibangun		1 Paket										DIKBUD	
		jumlah WC Kantor yang di bangun		3 unit										DIKBUD	
		jumlah Rehabilitasi WC Kantor yang rehab		3 unit										DIKBUD	
		Instalasi air Mess Guru		1 Paket										DIKBUD	
		Pembangunan tempat Parkir		1 Paket										DIKBUD	
		pembangnan pintu gerbang Kantor DIKBUD		1 Paket				1 Paket	50.000.000					DIKBUD	
		Pembangunan Gedung Kantor DIKBUD						1 Paket	50.000.000.000					DIKBUD	
		Pembangunan Pagar Kantor DIKBUD						1 Paket	200.000.000					DIKBUD	
														DIKBUD	

	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			67.800.000		113.800.000		113.800.000		113.800.000		113.800.000	DIKBUD	
		Jumlah Pemeliharaan Speed Bood	1 Speed Bood	1 Speed Bood		1 Speed Bood		1 Speed Bood		1 Speed Bood		1 Speed Bood		DIKBUD	
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Motor	28 Motor	28 Motor		28 Motor		28 Motor		28 Motor		28 Motor		DIKBUD	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpeliharanya Rumah Gedung Kantor			117.020.000									DIKBUD	
		jumlah gedung kantor yang direhab		1 unit										DIKBUD	
	Pembangunan Mess Dinas Pendidikan				169.700.000									DIKBUD	
		Jumlah Mess Dinas Pendidikan yang di Bangun	1 Mess Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											DIKBUD	
		Jumlah Pelantar mess Dinas Pendidikan yang dibangun	1 Paket											DIKBUD	
	Pemeliharaan Digital Society	jumlah Digital Society yang terpelihara		2 Digital Society	39.807.000	2 Digital Society	39.390.900	2 Digital Society	39.390.900	2 Digital Society	39.390.900	2 Digital Society	39.390.900	DIKBUD	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						913.634.000		913.634.000		913.634.000		913.634.000	DIKBUD	
		Jumlah Kedaraan Dinas yang di Pelihara Secara rutin/berkala	29 Kendaraan	29 Kendaraan		30 Kendaraan		30 Kendaraan		30 Kendaraan		30 Kendaraan		DIKBUD	
	Penyediaan Sarana Pendukung													DIKBUD	
		Tersedianya Penimbunan Tanah Merah	1 Paket											DIKBUD	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				24.000.000				190.000.000				190.000.000	DIKBUD	

		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	jumlah Pakaian Batik Harian Pegawai DPOR		80 stel	24.000.000			80 stel	40.000.000			80 stel	40.000.000	DIKBUD	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Harian dan Atributnya Pegawai DPOR dan UPT Kecamatan	199 stel					80	150.000.000,00			80	150.000.000,00	DIKBUD	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				694.021.300		724.692.300		724.692.300		724.692.300		724.692.300	DIKBUD	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	12 Orang	182.495.000	12 Orang	182.495.000	12 Orang	182.495.000	12 Orang	182.495.000	12 Orang	182.495.000	DIKBUD	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	120 Orang	120 Orang	95.379.000	120 Orang	94.994.000	120 Orang	94.994.000	120 Orang	94.994.000	120 Orang	94.994.000	DIKBUD	
		Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Prestasi Kerja PNS	80 Orang	80 Orang	115.216.000	80 Orang	112.461.000	80 Orang	112.461.000	80 Orang	112.461.000	80 Orang	112.461.000	DIKBUD	
		Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Penyusunan Tata Naskah Dinas	120 Orang	120 Orang	148.750.000	120 Orang	149.531.000	120 Orang	149.531.000	120 Orang	149.531.000	120 Orang	149.531.000	DIKBUD	
		Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah	80 Orang	80 Orang	152.181.300	80 Orang	133.157.800	80 Orang	133.157.800	80 Orang	133.157.800	80 Orang	133.157.800	DIKBUD	
		Sosialisasi Aset Bos Pusat	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Aset Bos Pusat				69 Orang	52.053.500	69 Orang	52.053.500	69 Orang	52.053.500	69 Orang	52.053.500	DIKBUD	

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				734.234.800		1.234.870.600		1.234.870.600		1.234.870.600		1.269.870.600	DIKBUD	
	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen	35.000.000	DIKBUD	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.552.800	1 Dokumen	15.767.800	1 Dokumen	15.767.800	1 Dokumen	15.767.800	1 Dokumen	15.767.800	DIKBUD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.947.000	1 Dokumen	35.172.100	1 Dokumen	35.172.100	1 Dokumen	35.172.100	1 Dokumen	35.172.100	DIKBUD	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.207.500	1 Dokumen	12.207.000	1 Dokumen	12.207.000	1 Dokumen	12.207.000	1 Dokumen	12.207.000	DIKBUD	
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95.651.000	1 Dokumen	115.479.500	1 Dokumen	115.479.500	1 Dokumen	115.479.500	1 Dokumen	115.479.500	DIKBUD	
	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	DIKBUD	
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.499.500	1 Dokumen	22.484.500	1 Dokumen	22.484.500	1 Dokumen	22.484.500	1 Dokumen	22.484.500	DIKBUD	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	182.026.000	1 Dokumen	251.968.700	1 Dokumen	251.968.700	1 Dokumen	251.968.700	1 Dokumen	251.968.700	DIKBUD	
	Pengadaan dan Implementasi Komputerisasi SIM Perjalanan Dinas	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	DIKBUD	
	Pendataan Aset Barang Milik Negara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.994.000	1 Dokumen	126.569.000	1 Dokumen	126.569.000	1 Dokumen	126.569.000	1 Dokumen	126.569.000	DIKBUD	

		Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.357.000	1 Dokumen	30.222.000	1 Dokumen	30.222.000	1 Dokumen	30.222.000	1 Dokumen	30.222.000	DIKBUD	
		Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Aset BOS	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	DIKBUD	
		Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan BOS	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	DIKBUD	
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan	Sasaran 1.1. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah		7,05		7,1		7,15		7,2		7,25		DIKBUD	
			Harapan Lama Sekolah		11,89		11,94		11,99		12,04		12,04		DIKBUD	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55,17	58,50 %		59,00%		59,50 %		60,00 %		60,50%		DIKBUD	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	90,44	100		100		100		100		100		DIKBUD	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	89,74	91,25		91,50		91,75		92,00		92,15		DIKBUD	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SLDB/MI/Paket A	96,1	96,25		96,50		96,75		97,00		97,25		DIKBUD	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	59,77	60,15		63,45		67,8		70,13		70,15		DIKBUD	
			Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,21	0,20		0,19		0,18		0,17		0,16		DIKBUD	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,21	0,20		0,19		0,18		0,17		0,16		DIKBUD	
			Angka Kelulusan (AL) SD	98,75	100		100		100		100		100		DIKBUD	
			Angka Kelulusan (AL) SMP	99,85	100		100		100		100		100		DIKBUD	
			Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	87,28	93,40		93,50		93,50		93,60		93,70		DIKBUD	
			Nilai Rata-rata Ujian Sekolah Siswa SD	61,9	62,5		64		65		67,5		68		DIKBUD	
			Nilai Rata-rata Ujian Nasional Siswa SMP	48,88	50,55		50,95		60		65		66		DIKBUD	
			Persentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	95,58	95,80		95,84		95,88		95,92		95,96		DIKBUD	
			Persentase guru sesuai kualifikasi SD/MI	64,26	66,26		67,26		69,26		70,00		71,00		DIKBUD	
			Persentase guru sesuai kualifikasi SMP/MTs	98,41	89,50		90,00		95,00		96,00		97,00		DIKBUD	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini				1.300.840.500		923.228.000		1.098.228.000		1.098.228.000		1.098.228.000	DIKBUD	

		Penambahan ruang kelas sekolah	jumlah PAUD / TK	3 unit	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	DIKBUD	
		Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas parkir				80.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	DIKBUD	
			jumlah Taman yang di bangun												DIKBUD	
			Jumlah Lapangan Upacara yang di bangun												DIKBUD	
			Jumlah Pagar yang di bangun		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		DIKBUD	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang di bangun												DIKBUD	
															DIKBUD	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Taman Kanak-kanak	jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Taman Kanak-kanak	2 Paket	1 Paket	150.000.000									DIKBUD	
		Pengadaan Mebeleur Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebeleur Sekolah	1 Sekolah				5 Sekolah	175.000.000	5 Sekolah	175.000.000	5 Sekolah	175.000.000	DIKBUD		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	2 Sekolah	1 Sekolah	150.000.000									DIKBUD	
		Rehabilitasi Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru	Jumlah Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru yang direhab		1 unit	50.000.000									DIKBUD	
		Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Taman Kanak-kanak	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Taman Kanak-kanak	50 Orang	50 Orang	85.205.000	50 Orang	79.340.000	50 Orang	79.340.000	50 Orang	79.340.000	50 Orang	79.340.000	DIKBUD	

		Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Taman Kanak-kanak	Jumlah Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Taman Kanak-kanak	46 TK	42 TK	483.956.000	27 TK	364.296.000	27 TK	364.296.000	27 TK	364.296.000	27 TK	364.296.000	DIKBUD	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Taman Kanak-kanak	Jumlah Perlombaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Taman Kanak-kanak	6 Perlombaan	6 Perlombaan	151.679.500	6 Perlombaan	149.592.000	6 Perlombaan	149.592.000	6 Perlombaan	149.592.000	6 Perlombaan	149.592.000	DIKBUD	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				42.955.316.865		57.855.314.900		57.175.314.900		57.175.314.900		57.175.314.900	DIKBUD	
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				592.000.000		6.336.715.000		6.336.715.000		6.336.715.000		6.336.715.000	DIKBUD	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala SD yang di Bangun												DIKBUD	
			Jumlah Rumah Dinas Guru SD yang di Bangun	1 unit	2 unit		33 Unit		33 Unit		33 Unit		33 Unit		DIKBUD	
			Jumlah Rumah Dinas Penjaga SD yang di Bangun												DIKBUD	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala SMP yang di Bangun												DIKBUD	
			Jumlah Rumah Dinas Guru SMP yang di Bangun	1 unit	1 unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		DIKBUD	
			Jumlah Rumah Dinas Penjaga SMP yang di Bangun												DIKBUD	
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah				1.389.000.000		801.000.000		801.000.000		801.000.000		801.000.000	DIKBUD	

		Jumlah Ruang Kelas SD yang di bangun	2 lokal	7 lokal		4 lokal		4 lokal		4 lokal		4 lokal		DIKBUD	
		Jumlah Ruang Kelas SMP yang di bangun		1 lokal		1 lokal		1 lokal		1 lokal		1 lokal		DIKBUD	
	Penambahan Ruang Guru Sekolah				160.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	DIKBUD	
		Jumlah Ruang Guru SD yang di Bangun		1 lokal		1 lokal		1 lokal		1 lokal		1 lokal		DIKBUD	
		Jumlah Ruang Guru SMP yang di Bangun												DIKBUD	
	Pembangunan Taman, Lapangan upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir Sekolah	Tersedianya Pembangunan Taman, Lapangan upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir Sekolah			3.315.000.000		3.301.686.000		3.301.686.000		3.301.686.000		3.301.686.000	DIKBUD	
		Jumlah Taman SD yang di bangun				2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah Lapangan Upacara SD yang di bangun	1 Sekolah	3 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah Pagar SD yang di bangun	8 Sekolah	12 Sekolah		9 Sekolah		9 Sekolah		9 Sekolah		9 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah Fasilitas Parkir SD yang di bangun												DIKBUD	
		Jumlah Taman SMP yang di bangun												DIKBUD	
		Jumlah Lapangan Upacara SMP yang di bangun	2 Sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah Pagar SMP yang di bangun	3 Sekolah	6 Sekolah		3 Sekolah		3 Sekolah		3 Sekolah		3 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah Fasilitas Parkir SMP yang di bangun												DIKBUD	

		Pembangunan Pelantar				1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		DIKBUD	
		Rehabilitasi Teras Sekolah				1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		DIKBUD	
		Pengecoran Halaman SD				2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		DIKBUD	
		Pengecoran Halaman SMP				1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		DIKBUD	
														DIKBUD	
														DIKBUD	
	Pengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa Sekolah													DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika Untuk SD	95 Sekolah											DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA Untuk SD	95 Sekolah											DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS Untuk SD	95 Sekolah											DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Untuk SD	95 Sekolah											DIKBUD	
		Jumlah Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesenian Untuk SD	95 Sekolah											DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan Untuk SD	95 Sekolah											DIKBUD	

		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika Untuk SMP												DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA Untuk SMP												DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS Untuk SMP												DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Untuk SMP												DIKBUD	
		Jumlah Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesenian Untuk SMP												DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan Untuk SMP												DIKBUD	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													DIKBUD	
		Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun												DIKBUD	
		Jumlah Perpustakaan SMP yang dibangun												DIKBUD	
	Pengadaan Meubelair				185.481.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000	DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Meubelair SD	23 Sekolah			1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Meubelair SMP	15 Sekolah	2 Sekolah		5 Sekolah		5 Sekolah		5 Sekolah		5 Sekolah		DIKBUD	
	Pengadaan perlengkapan sekolah						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	DIKBUD	

		Jumlah Pengadaan Laptop				5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		DIKBUD	
		Jumlah Pengadaan Printer				5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		DIKBUD	
	Rehabilitas Sedang / Berat Bangunan Sekolah				720.000.000									DIKBUD	
		Jumlah Bangunan SD yang di rehab Sedang												DIKBUD	
		Jumlah Bangunan SD yang di rehab Berat	1 Lokal	2 Lokal										DIKBUD	
		Jumlah Bangunan SMP yang di rehab Sedang												DIKBUD	
		Jumlah Bangunan SMP yang di rehab Berat		2 Lokal										DIKBUD	
	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah	Tersedianya Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah			1.685.125.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Kepala SD yang di Rehab Sedang												DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Kepala SD yang di Rehab Berat												DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Guru SD yang di Rehab Sedang	7 Sekolah	12 Sekolah										DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Guru SD yang di Rehab Berat				1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Penjaga SD yang di Rehab Sedang												DIKBUD	

		Jumlah Rumah Dinas Penjaga SD yang di Rehab Berat												DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Kepala SMP yang di Rehab Sedang												DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Kepala SMP yang di Rehab Berat		1 Sekolah										DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Guru SMP yang di Rehab Sedang												DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Guru SMP yang di Rehab Berat												DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Penjaga SMP yang di Rehab Sedang												DIKBUD	
		Jumlah Rumah Dinas Penjaga SMP yang di Rehab Berat												DIKBUD	
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah				444.519.000		2.085.800.000		2.085.800.000		2.085.800.000		2.085.800.000	DIKBUD	
		Jumlah Ruang Kelas SD yang di rehab Sedang		1 Sekolah										DIKBUD	
		Jumlah Ruang Kelas SD yang di rehab Berat	2 Sekolah			13 Sekolah		13 Sekolah		13 Sekolah		13 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah Ruang Kelas SMP yang di rehab Sedang		2 Sekolah										DIKBUD	
		Jumlah Ruang Kelas SMP yang di rehab Berat		1 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		DIKBUD	

		Rehabilitasi sedang/berat jaringan Instalasi Listrik dan perlengkapannya			35.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	DIKBUD	
		Jumlah Rehabilitasi SD sedang jaringan Instalasi Listrik dan perlengkapannya												DIKBUD	
		Jumlah Rehabilitasi SD berat jaringan Instalasi Listrik dan perlengkapannya				3 Sekolah		3 Sekolah		3 Sekolah		3 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah Rehabilitasi SMP sedang jaringan Instalasi Listrik dan perlengkapannya												DIKBUD	
		Jumlah Rehabilitasi SMP berat jaringan Instalasi Listrik dan perlengkapannya		1 Sekolah										DIKBUD	
	Pelatihan Kurikulum 2013 Bagi Guru SD dan SMP	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 Bagi Guru SD dan SMP	100 Orang	100 Orang	165.993.500	50 Orang	92.939.500	50 Orang	92.939.500	50 Orang	92.939.500	50 Orang	92.939.500	DIKBUD	
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana Melalui Dapordikdas	Jumlah Operator Sekolah / Kepala Sekolah se Kabupaten Kapuas Hulu	499 Peserta	501 Peserta	116.405.000	414 Peserta	116.405.000	414 Peserta	116.405.000	414 Peserta	116.405.000	414 Peserta	116.405.000	DIKBUD	
	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)				7.339.593.000		7.325.343.000		7.325.343.000		7.325.343.000		7.325.343.000	DIKBUD	

		Jumlah SD yang menerima Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	404 Sekolah	406 Sekolah		408 Sekolah		408 Sekolah		408 Sekolah		408 Sekolah		DIKBUD	
		Jumlah SMP yang menerima Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	95 Sekolah	95 Sekolah		96 Sekolah		96 Sekolah		96 Sekolah		96 Sekolah		DIKBUD	
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar yang mengikuti Kegiatan Paket B Setara SMP	6 Kelompok Belajar	6 Kelompok Belajar	81.462.500	4 Kelompok Belajar	88.621.100	4 Kelompok Belajar	88.621.100	4 Kelompok Belajar	88.621.100	4 Kelompok Belajar	88.621.100	DIKBUD	
	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar	Jumlah Guru Yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar	438 orang	438 orang	310.085.500	465 Orang	371.240.500	465 Orang	371.240.500	465 Orang	371.240.500	465 Orang	371.240.500	DIKBUD	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Perlombaan minat, bakat dan kreativitas siswa	6 Perlombaan	7 Perlombaan	916.173.000	6 Perlombaan	673.456.000	6 Perlombaan	673.456.000	6 Perlombaan	673.456.000	6 Perlombaan	673.456.000	DIKBUD	
	Pengelolaan siswa penerima BSM dan Program Indonesia Pintar	Jumlah SMP yang menerima Pengelolaan siswa penerima BSM dan Program Indonesia Pintar	95 Sekolah	95 Sekolah	30.387.000									DIKBUD	
	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar				99.350.000		99.350.000		99.350.000		99.350.000		99.350.000	DIKBUD	
		Jumlah SD yang Terakreditasi	100 Sekolah	80 Sekolah		80 Sekolah		80 Sekolah		80 Sekolah		80 Sekolah		DIKBUD	

		Jumlah SMP yang terakreditasi	50 Sekolah	20 Sekolah		20 Sekolah		20 Sekolah		20 Sekolah		20 Sekolah		DIKBUD	
	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar	Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar	1 Dokumen											DIKBUD	
	Pemetaan dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar				1 Dokumen	122.118.000	1 Dokumen	122.118.000	1 Dokumen	122.118.000	1 Dokumen	122.118.000	DIKBUD	
	Penyelenggaraan Try Out Ujian Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016 / 2017				376.803.000		401.892.000		401.892.000		401.892.000		401.892.000	DIKBUD	
		jumlah Peserta Try Out Ujian Sekolah SD/MI		4.860 siswa		5110 Siswa		5110 Siswa		5110 Siswa		5110 Siswa		DIKBUD	
		Jumlah Peserta Try Out Ujian Sekolah SMP/MTs	3.796 siswa	3.700 siswa		3.691 siswa		3.691 siswa		3.691 siswa		3.691 siswa		DIKBUD	
	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017				1.531.918.100		1.415.963.500		1.415.963.500		1.415.963.500		1.415.963.500	DIKBUD	
		jumlah Peserta Ujian Sekolah SD/MI		5151 siswa		5110 Siswa		5110 Siswa		5110 Siswa		5110 Siswa		DIKBUD	
		Jumlah Peserta Ujian Nasional SMP/MTs		2000 Siswa		3.691 siswa		3.691 siswa		3.691 siswa		3.691 siswa		DIKBUD	
	Fasilitas Pengelolaan Dana Beasiswa Siswa Miskin	jumlah siswa yang menerima Dana Beasiswa Siswa Miskin	400 Siswa	409 siswa	282.710.400									DIKBUD	

		Fasilitas Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar	Jumlah Sekolah Yang menerima Fasilitas Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar				514 Sekolah	103.022.400	514 Sekolah	103.022.400	514 Sekolah	103.022.400	514 Sekolah	103.022.400	DIKBUD	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar			21.842.000.000			1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	DIKBUD	
		Tersedianya Alat-alat Laboratorium SD	2 Sekolah	41 Sekolah											DIKBUD	
		Tersedianya Media Pendidikan SD	6 Sekolah												DIKBUD	
		Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	4 Sekolah												DIKBUD	
		Tersedianya Buku Koleksi Perpustakaan SD	3 Sekolah	46 Sekolah											DIKBUD	
		Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SD		64 Ruang											DIKBUD	
		Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SMP		38 Ruang											DIKBUD	
		Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru		20 Ruang											DIKBUD	
		Jumlah Pembangunan Lab. IPA		7 Sekolah											DIKBUD	
		Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah				3 Sekolah			3 Sekolah		3 Sekolah		3 Sekolah		DIKBUD	
															DIKBUD	
															DIKBUD	
		Fasilitas Penyelenggaraan Ulangan Umum Bersama (UUB) SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Ulangan Umum Bersama (UUB) SD/MI dan SMP/MTs	514 Sekolah	67.222.100	514 Sekolah	402.894.000	514 Sekolah	402.894.000	514 Sekolah	402.894.000	514 Sekolah	402.894.000	DIKBUD		

		Pembangunan Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru			110.579.765		485.679.000		485.679.000		485.679.000		485.679.000	DIKBUD	
		Jumlah Pembangunan Kamar Mandi/ WC Siswa SD yang di Bangun												DIKBUD	
		Tersedianya Pembangunan Kamar Mandi/ WC Guru SD yang dibangun	2 lokal	4 lokal		9 lokal		9 lokal		9 lokal		9 lokal		DIKBUD	
		Jumlah Pembangunan Kamar Mandi/ WC Siswa SMP yang di Bangun												DIKBUD	
		Tersedianya Pembangunan Kamar Mandi/ WC Guru SMP yang dibangun				4 Lokal		4 Lokal		4 Lokal		4 Lokal		DIKBUD	
	Pengadan Buku-buku Pengayaan untuk Perpustakaan	Jumlah Sekolah yang menerima Pengadan Buku-buku Pengayaan untuk Perpustakaan			621.000.000		200.000.000							DIKBUD	
		Jumlah Buku Ensiklopedia SD	400 Paket			100 Paket								DIKBUD	
		Jumlah Buku Pengayaan SD	400 Paket			100 Paket								DIKBUD	
		Jumlah Buku Ensiklopedia SMP		12 Paket										DIKBUD	
		Jumlah Buku Pengayaan SMP		68 Paket										DIKBUD	

		Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSNI) di Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni (PORSNI) di Kab. Kapuas Hulu	23 Kecamatan	23 Kecamatan	320.152.000	23 Kecamatan	463.770.000	23 Kecamatan	463.770.000	23 Kecamatan	463.770.000	23 Kecamatan	463.770.000	DIKBUD	
		Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) dan FLSN Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Perlombaan Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) dan FLSN Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	8 perlombaan	8 perlombaan	217.357.000	10 perlombaan	170.619.900	10 perlombaan	170.619.900	10 perlombaan	170.619.900	10 perlombaan	170.619.900	DIKBUD	
		Pengadaan Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar	Tersedianya Pengadaan Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar												DIKBUD	
		Pembongkaran Bangunan Gedung Sekolah	Tersedianya Pembongkaran Bangunan Gedung Sekolah												DIKBUD	
		Pengadaan Tanah	Tersedianya Pengadaan Tanah				1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	DIKBUD	
		Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat						29.996.800.000		29.996.800.000		29.996.800.000		29.996.800.000	DIKBUD	
			Jumlah SD Yang menerima Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)				409 Sekolah		409 Sekolah		409 Sekolah		409 Sekolah		DIKBUD	
			Jumlah SD Yang menerima Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)				96 Sekolah		96 Sekolah		96 Sekolah		96 Sekolah		DIKBUD	

	Pembangunan dan Perluasan Asrama SMP	Tersedianya Pembangunan dan Perluasan Asrama SMP				1 sekolah	150.000.000	1 sekolah	150.000.000	1 sekolah	150.000.000	1 sekolah	150.000.000	DIKBUD	
	Kajian Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Perbatasan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	480.000.000							DIKBUD	
	Program Pendidikan Non Formal				1.577.599.000		1.475.398.400		1.549.168.320		1.626.626.736		1.707.958.073	DIKBUD	
	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal dan Informal (Bimtek Peningkatan Mutu PTK-PAUDNI)	Jumlah Peserta Yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal dan Informal (Bimtek Peningkatan Mutu PTK-PAUDNI)	100 Orang tutor PAUD	120 Orang tutor PAUD	72.530.500	100 Orang tutor PAUD	67.745.000	100 Orang tutor PAUD	72.530.500	100 Orang tutor PAUD	72.530.500	100 Orang tutor PAUD	72.530.500	DIKBUD	
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI)	Jumlah Lembaga	60 Lembaga PAUD	25 Lembaga PAUD	350.638.000	65 Lembaga PAUD	294.358.000	65 Lembaga PAUD	350.638.000	65 Lembaga PAUD	350.638.000	65 Lembaga PAUD	350.638.000	DIKBUD	
	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional	Jumlah Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	78.500.000	5 Kelompok	112.347.400	5 Kelompok	78.500.000	5 Kelompok	78.500.000	5 Kelompok	78.500.000	DIKBUD	
	Perencanaan dan Penyusunan Data Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	22.500.000	DIKBUD	
	Sosialisasi dan Pendidikan Program PAUDNI	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Program PAUDNI	100 orang	100 orang	60.442.500	100 orang	49.878.000	100 orang	60.442.500	100 orang	60.442.500	100 orang	60.442.500	DIKBUD	
	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Terselenggaranya Penyelenggaraan Paket C Setara SMA		1 keg	97.225.000				97.225.000		97.225.000		97.225.000	DIKBUD	

		Pembinaan bagi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non Formal dan Informal	Tersedianya Dana Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	5 PKBM	5 PKBM	133.125.000	5 PKBM	133.125.000	5 PKBM	133.125.000	5 PKBM	133.125.000	5 PKBM	133.125.000	DIKBUD	
		Apresiasi PTK PAUDNI	jumlah peserta lomba dalam Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI	22 orang	22 orang	77.684.000	22 orang	38.521.000	22 orang	77.684.000	22 orang	77.684.000	22 orang	77.684.000	DIKBUD	
		Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)	Jumlah bantuan operasional Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Tenaga Lapangan Dikmas (TDL) yang Profesional	5 PKBM	5 PKBM	80.742.000	6 PKBM	170.704.000	6 PKBM	80.742.000	6 PKBM	80.742.000	6 PKBM	80.742.000	DIKBUD	
		Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal	Jumlah Lembaga yang menerima Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini	100 Lembaga PAUD	121 Lembaga PAUD	343.200.000	22 TK	488.200.000	22 TK	343.200.000	22 TK	343.200.000	22 TK	343.200.000	DIKBUD	
		Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS	Jumlah Lembaga PAUD yang Mengikuti Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS		117 Lembaga PAUD yang sudah Memiliki NPSN	56.375.000				56.375.000		56.375.000		56.375.000	DIKBUD	
		Gebyar PAUDNI dalam Rangka Hari Anak Nasional	Jumlah Siswa yang mengikuti Gebyar PAUDNI dalam Rangka Hari Anak Nasional		100 Siswa	50.000.000	100 Siswa	44.165.000	100 Siswa	50.000.000	100 Siswa	50.000.000	100 Siswa	50.000.000	DIKBUD	

		Peningkatan Manajemen Pengelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	Jumlah Lembaga PAUD yang Mengikuti Peningkatan Manajemen Pengelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)		Penunjang Kegiatan Tim Pojka Akreditasi 20 Lembaga PAUD	20.000.000	Penunjang Kegiatan Tim Pojka Akreditasi 20 Lembaga PAUD	33.855.000	Penunjang Kegiatan Tim Pojka Akreditasi 20 Lembaga PAUD	20.000.000	Penunjang Kegiatan Tim Pojka Akreditasi 20 Lembaga PAUD	20.000.000	Penunjang Kegiatan Tim Pojka Akreditasi 20 Lembaga PAUD	20.000.000	DIKBUD	
		Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	Verifikasi Lembaga PAUD yang menerima BOP PAUD		99 Lembaga PAUD	20.705.000	99 Lembaga PAUD	20.000.000	99 Lembaga PAUD	20.705.000	99 Lembaga PAUD	20.705.000	99 Lembaga PAUD	20.705.000	DIKBUD	
		Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD	Jumlah Tutor yang mengikuti Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD		100 Orang tutor PAUD	113.932.000	keg		keg	113.932.000	keg	113.932.000	keg	113.932.000	DIKBUD	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				11.355.437.000		11.640.328.000		11.640.328.000		11.640.328.000		11.640.328.000	DIKBUD	
		Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	23 UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23 UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	186.689.500	23 UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	169.681.000	23 UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	169.681.000	23 UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	169.681.000	23 UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	169.681.000	DIKBUD	
		Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah Kegiatan pemilihan tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi dan berdedikasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	324.273.500	6 Kegiatan	124.762.500	6 Kegiatan	124.762.500	6 Kegiatan	124.762.500	6 Kegiatan	124.762.500	DIKBUD	

		Pelatihan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Pengawas Sekolah	40 peserta	40 peserta	88.370.000	40 Peserta	89.000.000	40 Peserta	89.000.000	40 Peserta	89.000.000	40 Peserta	89.000.000	DIKBUD	
		Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS	Jumlah Guru Non PNS	130 orang	618 orang	9.824.103.000	618 orang	10.017.203.000	618 orang	10.017.203.000	618 orang	10.017.203.000	618 orang	10.017.203.000	DIKBUD	
		Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	Jumlah Guru yang dapat dinilai Angka Kredit	330 Orang	100 Orang	95.616.000	240 Orang	118.316.000	240 Orang	118.316.000	240 Orang	118.316.000	240 Orang	118.316.000	DIKBUD	
		Pelatihan Kompetensi Pengawas Sekolah Dasar	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pengawas Sekolah yang memiliki kinerja yang baik	40 orang	40 orang	48.320.000									DIKBUD	
		Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada Sekolah Dasar memiliki kinerja yang baik	605 Orang	490 Orang	211.372.000	495 Orang	141.362.000	495 Orang	141.362.000	495 Orang	141.362.000	495 Orang	141.362.000	DIKBUD	
		Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru SMP(OSN G SMP)	jumlah peserta yang mengikuti OSN Guru Mata Pelajaran	150 peserta	100 Peserta	78.575.000	100 Orang	83.575.000	100 Orang	83.575.000	100 Orang	83.575.000	100 Orang	83.575.000	DIKBUD	
		Pelantikan Kepala Sekolah				32.212.500		50.601.500		50.601.500		50.601.500		50.601.500	DIKBUD	
			jumlah Guru yang dilantik menjadi Kepala SD		75 Guru		50 Guru		50 Guru		50 Guru		50 Guru		DIKBUD	
			jumlah Guru yang dilantik menjadi Kepala SMP	47 Guru	45 Guru		30 Guru		30 Guru		30 Guru		30 Guru		DIKBUD	
		Penyelenggaraan Rapat Tim Promosi Mutasi Kepala Sekolah dan Guru	jumlah peserta yang mengikuti Rapat Tim Promosi Mutasi Kepala Sekolah dan Guru	15 peserta	15 peserta	29.586.500	25 peserta	22.439.500	25 peserta	22.439.500	25 peserta	22.439.500	25 peserta	22.439.500	DIKBUD	

		Bimbingan Teknis Aplikasi Komputer untuk Program Perkantoran	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi Komputer untuk Program Perkantoran	50 peserta	50 peserta	91.775.000									DIKBUD	
		Pelatihan Guru Pembelajar Jenjang Dikdas	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pelatihan Guru Pembelajar Jenjang Dikdas		300 peserta	262.832.000	140 orang	262.832.000	140 orang	262.832.000	140 orang	262.832.000	140 orang	262.832.000	DIKBUD	
		Sosialisasi Team Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Team Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Daerah	25 Orang	25 Orang	57.756.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	DIKBUD	
		Sosialisasi Narkoba	Jumlah Peserta yang Kegiatan Sosialisasi Narkoba		200 peserta	23.956.000	400 Peserta	26.656.000	400 Peserta	26.656.000	400 Peserta	26.656.000	400 Peserta	26.656.000	DIKBUD	
		Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan 8 standart Pendidikan	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan 8 standart Pendidikan				506 orang	115.977.500	506 orang	115.977.500	506 orang	115.977.500	506 orang	115.977.500	DIKBUD	
		Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS	Jumlah Peserta yang Kegiatan Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS				117 Orang	56.375.000	117 Orang	56.375.000	117 Orang	56.375.000	117 Orang	56.375.000	DIKBUD	
		Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD	Jumlah Peserta yang KegiatanDiklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD				113 orang	113.577.500	113 orang	113.577.500	113 orang	113.577.500	113 orang	113.577.500	DIKBUD	

		Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Guru Figur dalam Proses Belajar Mengajar	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Guru Figur dalam Proses Belajar Mengajar				120 orang	197.969.500	120 orang	197.969.500	120 orang	197.969.500	120 orang	197.969.500	DIKBUD	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				1.355.949.800		353.024.800		353.024.800		353.024.800		353.024.800	DIKBUD	
		Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan	50 peserta	50 peserta	127.349.000	50 peserta	103.624.000	50 peserta	103.624.000	50 peserta	103.624.000	50 peserta	103.624.000	DIKBUD	
		Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan pada UPT DPOR Kecamatan	Jumlah UPT yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan pada UPT DPOR Kecamatan	23 UPT	23 UPT	56.122.000	23 UPT	56.097.000	23 UPT	56.097.000	23 UPT	56.097.000	23 UPT	56.097.000	DIKBUD	
		Pembinaan Sekolah Penerima Dana BOS (Safe Guarding) Dikdas	Jumlah Peserta yang Kegiatan pembinaan ke sekolah penerima BOS dan BOS Daerah	497 Peserta	501 Peserta	172.478.800	514 Peserta	193.303.800	514 Peserta	193.303.800	514 Peserta	193.303.800	514 Peserta	193.303.800	DIKBUD	
		Pemetaan Permasalahan Pendidikan	Jumlah UPT yang Mengikuti Kegiatan Pemetaan Permasalahan Pendidikan		15 UPT	1.000.000.000									DIKBUD	
Tujuan 2. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Seni Daerah	Sasaran 2.1. Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2		2		2		2		2		DIKBUD	
			Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	14	14		14		14		14		14		DIKBUD	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				1.598.392.000		4.275.485.000		4.232.485.000		4.232.485.000		4.232.485.000	DIKBUD	

	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air		14 Peserta	103.092.000	14 Peserta	188.585.000	14 Peserta	218.585.000	14 Peserta	218.585.000	14 Peserta	218.585.000	DIKBUD	
	Pengembangan SDM Juru Pelihara BCB	Jumlah Juru Pemelihara BCB		4 Juru Pemelihara	30.300.000	4 Juru Pemelihara	31.300.000	4 Juru Pemelihara	31.300.000	4 Juru Pemelihara	31.300.000	4 Juru Pemeliharaan	31.300.000	DIKBUD	
	Penelitian Sejarah Kerajaan Bunut	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	100.000.000									DIKBUD	
	Penulisan Buku Suku Kantuk	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	150.000.000							DIKBUD	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Adat		8 Sarana dan Prasarana Adat	1.365.000.000	9 Sarana dan Prasarana Adat	3.830.600.000	9 Sarana dan Prasarana Adat	3.830.600.000	9 Sarana dan Prasarana Adat	3.830.600.000	9 Sarana dan Prasarana Adat	3.830.600.000	DIKBUD	
	Rehabilitasi Balai Adat	jumlah Rehabilitasi Balai Adat				1 balai adat	75.000.000	1 balai adat	75.000.000	1 balai adat	75.000.000	1 balai adat	75.000.000	DIKBUD	
	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Budaya Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Budaya Daerah						20 Orang	28.000.000	20 Orang	28.000.000	20 Orang	28.000.000	DIKBUD	
	Pengawasan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pemeliharaan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purba Kala	Jumlah Situs, Benda Cagar Budaya'						14 Situs, Benda Cagar Budaya	49.000.000	14 Situs, Benda Cagar Budaya	49.000.000	14 Situs, Benda Cagar Budaya	49.000.000	DIKBUD	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				659.693.000		685.807.000		659.693.000		659.693.000		659.693.000	DIKBUD	
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah alat Kesenian dan Kebudayaan Daerah		13 alat keseni	336.000.000	6 alat kesenian	320.000.000	6 alat kesenian	336.000.000	6 alat kesenian	336.000.000	6 alat kesenian	336.000.000	DIKBUD	

				an											
	Keikutaan Gelar Budaya Dalam Rangka Promosi Budaya	Jumlah Peserta yang Kegiatan Gelar Budaya Dalam Rangka Promosi Budaya		18 Peserta	173.700.000	18 Peserta	178.550.000	18 Peserta	173.700.000	18 Peserta	173.700.000	18 Peserta	173.700.000	DIKBUD	
	Pelatihan Tari dan Musik	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pelatihan Tari dan Musik		20 Peserta	77.825.000	20 Peserta	98.213.000	20 Peserta	77.825.000	20 Peserta	77.825.000	20 Peserta	77.825.000	DIKBUD	
	Pengelaran Pentas Pesona Budaya Daerah Kapuas Hulu	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pengelaran Pentas Pesona Budaya Daerah Kapuas Hulu		40 Peserta	72.168.000	40 Peserta	89.044.000	40 Peserta	72.168.000	40 Peserta	72.168.000	40 Peserta	72.168.000	DIKBUD	
	Program Pengembangan Nilai Budaya													DIKBUD	
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah													DIKBUD	
	Kegiatan Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di bidang Budaya													DIKBUD	
	Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya													DIKBUD	
	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah													DIKBUD	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikaor kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang dibutuhkan. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung. Untuk itu sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 merupakan capaian pembangunan dan tahun 2016 - 2021 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Adapun Penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam dokumen perubahan RPJMD diuraikan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Dokumen RPJM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencn aan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencn aan
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	C	CC	CC	CC	B	BB	BB
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI	96,10	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25	97,25
3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	59,77	60,15	63,45	67,80	70,13	70,15	70,15

4	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	90,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	89,74	91,25	91,50	91,75	92,00	92,15	92,15
6	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,21	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,21	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16
8	Rata - Rata Nilai UN dan UAS SD/MI	61,90	62,50	64,00	65,00	67,50	68,00	68,00
9	Rata - Rata Nilai UN dan UAS SMP/MTs	48,88	50,55	50,95	60,00	65,00	65,50	66,00
10	Persentase guru sesuai kualifikasi SD	64,26	66,26	67,26	69,26	70,00	71,00	71,00
11	Persentase guru sesuai kualifikasi SMP	98,41	89,50	90,00	95,00	96,00	97,00	97,00
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Angka Melanjutkan Dari SD ke SMP	87,28	93,40	93,50	93,60	93,70	93,80	93,80
15	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55,17	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50	60,50
16	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2	2	2
17	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	14	14	14	14	14	14	14
18	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun	7,01	7,05	7,10	7,15	7,20	7,25	7,25
19	Harapan Lama Sekolah	11,85	11,89	11,94	11,99	12,04	12,04	12,04
20	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	95,58	95,80	95,84	95,88	95,92	95,96	94,96

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang merupakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Putussibau, 08 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PERTUS KUSNADI, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009